

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan yang tidak bersahabat antara Arab Saudi dan Iran sudah lama terjadi sejak mencetusnya Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Iran muncul sebagai negara teokrasi yang mendukung isu-isu Syi'ah di seluruh kawasan Timur Tengah seperti di Lebanon, Irak dan negara-negara lain.<sup>1</sup> Revolusi negara Syi'ah terbesar di dunia tersebut mendorong Arab Saudi meningkatkan pengaruh Wahabi dan Sunninya di kawasan, seiring dengan persaingan dua aliran agama Islam yang sudah lama berlangsung. Meskipun hubungan dua negara tersebut sering mengalami fluktuasi dalam perjalanan sejarahnya, eskalasi persaingan antara keduanya lebih sering terjadi.

Bermula pada tahun 1987, persaingan antara keduanya terjadi ketika pemerintah Irak mendapat dukungan dari Arab Saudi dalam perang melawan Iran.<sup>2</sup> Hubungan diplomatik dua negara ini sempat putus pada masa pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Setelah Iran melakukan pemilihan umum presiden pada tahun 1997, hubungan Iran dan Arab Saudi membaik. Puncaknya ialah ketika kedua negara menandatangani kesepakatan keamanan pada 2001. Namun hubungan mereka kembali pada tensi yang tinggi dua tahun kemudian, setelah penggulingan Saddam Hussein di mana Amerika Serikat

---

<sup>1</sup> Hanna Azarya Samosir, *Sejarah Panjang Perselisihan Arab Saudi dan Iran*, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160105133321-120-102293/sejarah-panjang-perselisihan-arab-saudi-dan-iran/> (07/05/16, 02:57 WIB)

<sup>2</sup> *Ibid.*

menginvasi Irak. Penggulingan pimpinan Irak ini, membuat Saudi dan Iran bersaing keras sebagai upaya untuk menancapkan kekuasaan setiap kubu dalam pemerintahan Irak.

Dalam perkembangannya, hubungan Iran dan Arab Saudi tidak jarang semakin memburuk dan membuat kawasan Timur Tengah terancam. Meskipun demikian, kedua negara tidak pernah terlibat perang secara langsung. Dampak dari persaingan itu lebih terlihat pada matriks *proxy war*, dimana dua negara yang bersaing tidak secara langsung saling menyerang namun saling adu kekuatan di daerah konflik.<sup>3</sup> Beberapa negara yang menjadi korban *proxy war* salah satunya ialah Yaman, di mana terdapat kelompok pemberontak Syiah, Houthi, yang berhubungan dengan Iran. Iran kerap menyelundupkan senjata-senjata militer ke Yaman yang ditujukan kepada Houthi. Sedangkan Saudi mengirimkan kekuatan militernya untuk menggempur Houthi guna membendung kekuatan Iran di Yaman dengan dalih untuk mendukung pemerintahan resmi Yaman di bawah Presiden Abd Mansour Hadi.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang mendorong Iran dan Arab Saudi berada pada hubungan yang sangat tidak bersahabat, antara lain ialah Sensitivitas Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah merupakan perpecahan dari tubuh Islam yang disebabkan oleh perbedaan dalam aqidah Islam<sup>5</sup> dan membentuk suatu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Martin Reardon, *Saudi Arabia, Iran and the 'Great Game' in Yemen*, diakses dalam <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/09/saudi-arabia-iran-great-game-ye-201492984846324440.html> (09/10/2016, 00:28 WIB)

<sup>5</sup> Perbedaan akidah islam yang dimaksud berupa perbedaan rukun islam, rukun iman, syahadat, cara pandang terhadap imamah, cara pandang terhadap khulafaurrasyidin, cara pandang terhadap kemaksuman para imam, cara pandang terhadap Aisyah dan para sahabat, Al-Qur'an, Hadist, cara sholat dan lain-lain.

kekuatan tersendiri di beberapa wilayah, khususnya Timur Tengah. Basis terbesar dari kubu Sunni dan Syiah berada di Arab Saudi dan Iran, di mana negara dengan mayoritas penganut Islam Sunni ialah Arab Saudi, sedangkan negara dengan populasi Islam Syiah terbesar ialah Iran.<sup>6</sup> Populasi muslim Syiah mencapai 66-70 juta penganut pada tahun 2009 yang berarti sepertiga populasi muslim Syiah berada di Iran.<sup>7</sup> Sedangkan populasi muslim sunni di Arab Saudi mencapai 22-23 juta penganut atau 85-90% dari populasi muslim Arab Saudi pada saat itu.<sup>8</sup> Perbedaan cara pandang ini kerap menjadikan dua negara besar tersebut terlibat dalam konflik.

Ideologi politik juga mendorong terciptanya permusuhan antara Iran dan Saudi. Sistem pemerintahan kerajaan Arab Saudi ialah Islam konservatif sedangkan Iran, melalui revolusi Islam Iran tahun 1979, mengantarkannya mengadopsi Islam revolusioner.<sup>9</sup> Islam konservatif dalam artian hukum islam yang diterapkan terlalu kaku dan masih menggunakan monarki absolut di mana kekuasaan berpusat di kerajaan dan suara rakyat sangat terbatas untuk didengar. Sedangkan Islam revolusioner dalam artian hukum islam masih diterapkan namun lebih modern dan lebih demokratis, di mana pemerintah juga memberikan hak dan suara untuk masyarakatnya dalam hal politik, ekonomi, sosial dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Sabine Hartert-Mojdehi, *Sunni dan Syiah, Bersaing sejak Dulu*, diakses dalam <http://www.dw.com/id/sunni-dan-syiah-bersaing-sejak-dulu/a-16189563> ( 07/05/16, 02:26 WIB)

<sup>7</sup> Pew Research Center, *Mapping The Global Muslim Population*, diakses dalam <http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/> (08/11/17, 14:26 WIB)

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> BBC, *Tujuh Hal Tentang Permusuhan Iran Dan Arab Saudi*, diakses dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105\\_dunia\\_iransaudi\\_musuh](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160105_dunia_iransaudi_musuh) (09/10/16, 00:55 WIB)

Revolusi Islam Iran yang dipimpin Khomeini pada saat itu kemudian disebarkan kepada negara-negara tetangga sebagai semangat revolusioner dalam menentang kekuatan Barat dan untuk melindungi hak-hak penganut Syiah yang berada di negara-negara tetangga.<sup>10</sup> Khomeini menyerukan dibangunnya negara Islam yang revolusioner yang tidak pro Barat ataupun Timur dan menyebarkan semangat revolusi bagi negara-negara konservatif. Hal ini mengirimkan sinyal ancaman bagi Arab Saudi yang merupakan negara kerajaan yang menganut sistem Islam konservatif. Arab Saudi memandang kebangkitan Republik Islam Iran ini dapat melemahkan posisinya di Timur Tengah sebagai suatu kekuatan yang cukup dominan di kawasan.

Selain itu, faktor lain adalah persaingan minyak. Minyak baik bagi Iran maupun Arab Saudi merupakan sumber perekonomian bagi negara masing-masing. Khususnya bagi Saudi yang merupakan produsen minyak terbesar di dunia. Pada tahun 2014, minyak mengalami penurunan nilai secara drastis hingga hampir setengah dari nilai pasar global, berlanjut sampai Januari 2015, di mana harga minyak mentah Brent dan Arab Light turun mencapai kurang dari 50 dollar AS per barrel.<sup>11</sup> Iran bersamaan dengan Rusia meletakkan kesalahan kepada Arab Saudi. Menurut kedua negara tersebut, krisis minyak yang terjadi dikarenakan meluapnya pasokan minyak di pasar global. Arab Saudi dinilai harus bertanggung

---

<sup>10</sup> Tali Rachel Grumet, 2015, *New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran 's Rivalry*, Disertasi, Denver, The Faculty of the Joseph Korbel School of International Studies, University of Denver hal. 56.

<sup>11</sup> Al Jazeera Center for Studies, 2015, *Power Imbalance: Iran's Gains, Saudi's Challenges*, diakses dalam <http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2015/01/201512512714307969.html> (08/11/16, 18:43 WIB)

jawab sebagai satu-satunya negara yang mampu dengan mudah memproduksi minyak 6 sampai 12 juta barrel per hari.<sup>12</sup>

Iran dan Rusia menuduh Arab Saudi tidak mau mengurangi produksi minyaknya atau juga Saudi gagal dalam memberikan pemahaman bagi negara-negara yang tergabung dalam *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan non OPEC untuk memotong produksi minyak. Akhirnya Iran memutuskan untuk mengkonsep ulang anggaran negaranya pada tahun tersebut, dengan mengubah proyeksi harga minyak dari 70 dollar AS per barrel menjadi 40 dollar AS per barrel. Dalam hal ini, Iran dan Saudi memiliki kepentingan masing-masing yang berbeda terhadap minyak, baik mengenai seberapa banyak minyak yang diproduksi maupun mengenai berapa harga yang dipasang.

Faktor lain yang mempengaruhi hubungan Iran dan Saudi ialah militer. Secara kuantitas, pendukung Iran relatif lebih sedikit ketimbang Arab Saudi karena memang populasi Sunni lebih mendominasi di dunia Islam, khususnya di kawasan Timur Tengah. Sampai pada abad ke 21 ini, masyarakat Muslim yang menganut Syiah hanya sekitar 10-15% dari seluruhnya 1,6 milyar warga muslim di dunia.<sup>13</sup> Iran yang kalah secara kuantitas perlu memiliki keunggulan dalam hal lain, negara mayoritas Syiah itu kemudian meningkatkan kualitas kekuatan militernya melalui program nuklir. Salah satu yang membuat Iran ditakuti ialah program nuklirnya. Sejak tahun 2003, pengembangan tenaga nuklir Iran mendapatkan tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat karena dianggap sebagai ancaman. Pada tahun tersebut, ditemukan pabrik Uranium

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Sabine Hartert-Mojdehi, *Op. Cit.*

berkadar tinggi di Natanz, Iran oleh Badan Energi Atom Internasional/*International Atomic Energy Agency* (IAEA).<sup>14</sup>

Beberapa faktor di atas sering membuat Arab Saudi dan Iran masuk dalam suatu ketegangan ataupun permasalahan. Salah satu permasalahan yang memicu kembali ketegangan antar dua negara pada awal tahun 2016 ialah pelaksanaan eksekusi mati Arab Saudi terhadap 47 orang yang dihukum karena kejahatan terorisme. Salah satu dari mereka adalah Nimr al-Nimr yang merupakan ulama' besar Syi'ah.<sup>15</sup> Nimr al-Nimr yang sering disebut sebagai Syeikh Nimr ialah syeikh Syiah yang hidup di Al-Awamiyah, Provinsi Timur Arab Saudi, ia lahir pada tahun 1959. Nimr sangat terkenal di kalangan pemuda karena sikap kritisnya terhadap pemerintah dan sempat menyarankan pemisahan diri dari Arab Saudi pada tahun 2009 jika hak-hak kelompok Syiah tidak dihormati.

Pada tahun 2012 Nimr ditahan karena meminta campur tangan asing mengenai urusan-urusan Arab Saudi serta tidak mematuhi hukum yang berlaku. Nimr dijatuhi hukuman mati oleh SCC (*Specialized Criminal Court*) pada 15 Oktober 2014 dengan dakwaan melawan pemerintah dan mengangkat senjata melawan pasukan keamanan. Akhirnya pada 2 Januari 2016 eksekusi mati terhadap Nimr al-Nimr dilaksanakan, di mana eksekusi ini mengundang kecaman dari masyarakat Internasional seperti Inggris, Bahrain dan negara lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> 10 Fakta Mengenai Nuklir Iran, diakses dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140922155915-120-3985/10-fakta-mengenai-nuklir-iran/> (07/05/16, 09:41 WIB)

<sup>15</sup> Arab Saudi Eksekusi Mati Ulama Syi'ah, diakses dalam [http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102\\_dunia\\_arabsaudi\\_eksekusi](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160102_dunia_arabsaudi_eksekusi) (02/04/16, 11:09 WIB)

<sup>16</sup> Patryk Pawlak, *Iran-Saudi Arabia relations Figuring out the next move*, diakses dalam [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573913/EPRS\\_BRI\(2016\)573913\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573913/EPRS_BRI(2016)573913_EN.pdf) (08/12/16, 03:56 WIB)

Pasca eksekusi mati Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi yang didakwa sebagai teroris serta melawan pemerintah, Iran sebagai negara dengan masyarakat Syi'ah terbesar di dunia mengecam perbuatan tersebut.<sup>17</sup> Hal ini mendorong masyarakat Iran untuk melakukan demonstrasi di depan kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran, hingga akhirnya berujung pada pembakaran dan penyerangan terhadap kantor kedutaan besar Arab Saudi.<sup>18</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Arab Saudi dan Iran sudah sejak lama memiliki rivalitas yang signifikan di tingkat regional. Rivalitas antar dua negara besar di Timur Tengah tersebut masih terus bergulir, mengingat kuatnya akar persaingan antar keduanya.

Oleh karena itu, studi mengenai politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr menarik untuk dibahas, paling tidak dengan beberapa alasan. *Pertama*, pembahasan dari topik tersebut akan memberikan penjelasan kritis dan analitis tentang bagaimana politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr. *Kedua*, pembahasan di atas akan memberikan gambaran tentang prospek perdamaian di Timur Tengah ke depannya, mengingat kedua negara memiliki pengaruh yang cukup besar bagi perdamaian di kawasan tersebut. Alasan-alasan di atas cukup menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI TERHADAP IRAN PASCA EKSEKUSI NIMR AL-NIMR”**.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Muhaimin, *Memanas, Saudi Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Iran*, diakses dalam <http://international.sindonews.com/read/1074167/43/memanas-saudi-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-iran-1451866025> (02/04/16, 11:15 WIB)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara analitis politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini, secara akademis diharapkan memberikan pengetahuan tentang gambaran dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran khususnya pasca eksekusi mati Nimr al-Nimr. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya kajian tentang dinamika di Timur Tengah.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi masyarakat untuk mengkaji dan mentelaah politik Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Iran. Selain itu, diharapkan juga penelitian ini dapat menambah informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai referensi yang berhubungan dengan rivalitas Arab Saudi dan Iran.



#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji permasalahan antara Arab Saudi dan Iran atau penelitian yang cukup relevan untuk dikaitkan dan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut berupa skripsi, artikel dan paper.

Pertama, skripsi Cecep Zakaria El-Bilad yang berjudul “*Rivalitas Antara Iran dan Arab Saudi dalam Perspektif Konstruktivis Alexandre Wendt*”. Penelitian ini membahas tentang muncul dan meningkatnya rivalitas antara Iran dan Arab Saudi pasca Revolusi Republik Islam Iran pada tahun 1979. Persaingan antara dua kekuatan terlihat jelas setidaknya pada tiga isu besar di kawasan, antara lain konflik Irak, konflik Libanon dan nuklir Iran.<sup>19</sup> Masalah yang diangkat ialah Mengapa rivalitas di antara kedua negara bisa terjadi sejak 1979. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut, Cecep menggunakan *systemic constructivism*, salah satu varian konstruktivis Hubungan Internasional (HI) yang fokus kajiannya pada peran konstitutif agen/aktor negara dalam struktur internasional.<sup>20</sup>

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dua kekuatan masing-masing berambisi untuk menjadi kekuatan dominan/pemimpin regional (*regional leadership*) di Timur Tengah. Selama keduanya sama-sama berpegang teguh pada ambisi masing-masing, rivalitas antara dua negara tersebut akan terus berlanjut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada topik, yaitu

---

<sup>19</sup> Cecep Zakaria El-Bilad, 2011, *Rivalitas Iran dan Arab Saudi dalam perspektif konstruktivis Alexandre Wendt*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

<sup>20</sup> *Ibid.*

membahas tentang hubungan permusuhan Saudi dan Iran. Sedangkan perbedaannya, penelitian Cecep ini lebih membahas latar belakang dimulainya persaingan dan permusuhan Saudi dan Iran. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang keberlanjutan permusuhan antar dua negara dan semakin melebarnya kompleksitas permasalahan antar dua negara besar tersebut.

Kedua, Skripsi Ilham Virgo yang berjudul “*Pengaruh Nuklir Iran Terhadap Peningkatan Postur Militer Arab Saudi 2005-2009*”. Skripsi ini meneliti tentang perilaku Arab Saudi dalam meningkatkan postur militernya yang disebabkan oleh pengembangan nuklir Iran. Pengembangan teknologi nuklir Iran diyakini memberikan ancaman bagi negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, pengembangan teknologi nuklir Iran sejak tahun 1950an banyak mendapat tentangan dari luar. Sekitar tahun 1679-1835 saja, sudah terdapat enam resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB mengenai nuklir Iran. Isi dari semua resolusi tersebut adalah agar Iran menghentikan pengembangan teknologi nuklir demi mematuhi prinsip internasional.

Akibat dari kekhawatiran terhadap pengembangan nuklir di Iran, negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi melakukan peningkatan persenjataan militer secara signifikan. Data yang dikeluarkan SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) pada tahun 2010, menyebutkan bahwa telah terjadi peningkatan lebih dari 20 persen terhadap ekspor senjata ke kawasan Timur Tengah untuk periode 2005-2009. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa Arab Saudi meningkatkan kekuatan militernya.

---

<sup>21</sup> Ilham Virgo, 2013, *Pengaruh Nuklir Iran Terhadap Peningkatan Postur Militer Arab Saudi 2005-2009*, Skripsi, Malang,: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan konsep *deterrence*, *security dilemma* serta *balance of power theory*.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa nuklir Iran sangat berpengaruh dalam menciptakan *security dilemma* bagi Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, nuklir Iran merupakan ancaman bagi keamanan negaranya serta kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik, di mana topik yang diangkat mengenai rivalitas Arab Saudi dan Iran. Perbedaannya ialah penelitian Ilham lebih mengarah pada persaingan militer antara Arab Saudi dan Iran sebagai kapabilitas nasional masing-masing negara. Sedangkan penelitian penulis mengarah pada strategi dari pihak Arab Saudi dalam melemahkan kekuatan pihak lawan (Iran).

Ketiga, Reza Ekhtiari Amiri dan Ku Hasnita Ku Samsu yang berjudul "*Role of Political Elites in Iran-Saudi Economic Cooperation*". Jurnal ini membahas tentang hubungan kerjasama ekonomi Arab Saudi dan Iran pada masa Presiden Hasyemi Rafsanjani (1989-1997) dan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Terjalannya hubungan kerjasama tersebut tidak lepas dari peran elit politik kedua Negara.<sup>22</sup> Hasyemi Rafsanjani sebagai presiden pertama *post-war* memiliki karakter yang cukup mempengaruhi hubungan Iran dengan Negara-Negara luar. Karakteristik Rafsanjani yang menonjol ialah sifatnya yang moderat. Ia tidak kaku atau keras dalam mengambil suatu keputusan maupun dalam berasosiasi dengan pihak luar. Sehingga karakter ini mampu mempengaruhi

---

<sup>22</sup> Reza Ekhtiari Amiri dan Ku Hasnita Ku Samsu, *Role of Political Elites in Iran-Saudi Economic Cooperation*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol, 1, No.12, Selangor: Universiti Putra Malaysia (UPM), hal. 107.

kebijakan luar negeri Iran untuk menjalin hubungan kerjasama antara Iran dan Arab Saudi sejak revolusi 1979.

Selain itu, Hasyemi Rafsanjani melihat kondisi dalam negeri Iran pada saat itu sangat kacau dalam ekonomi dan kesejahteraan pasca perang delapan tahun Iran-Irak. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan pengembangan dalam ekonomi, salah satunya ialah bekerjasama dengan Arab Saudi yang merupakan produsen minyak terbesar. Setelah berakhirnya masa kepresidenan Hasyemi Rafsanjani tahun 1997, Iran dipimpin oleh Mohammad Khatami. Kebijakan Iran pada masa Rafsanjani dalam berhubungan baik dengan Arab Saudi terus dilanjutkan Khatami. Alasan utama rakyat Iran mendukung Khatami ialah; pertama, Khatami membuat pembaruan berupa kebebasan dalam negeri dan perdamaian diluar negeri. Dua karakter utama kebijakan Khatami ini mengantarkan Iran pada hubungan kerjasama yang lebih harmonis dari pada masa kepemimpinan sebelumnya.

Selain keinginan dua pemimpin Iran untuk menjalin kerjasama dengan Arab Saudi, peranan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz turut meningkatkan eratnya hubungan antar dua Negara. Abdullah merupakan raja yang moderat, berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Fahd yang dalam kebijakan luar negerinya melihat Iran sebagai lawan. Abdullah tertarik untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-Negara Islam dan kawasan, bahkan dengan Negara Syiah seperti Iran. Hal ini didorong oleh pemahaman Abdullah mengenai kebijakan luar negeri bahwa tidak ada yang abadi, baik itu teman maupun musuh. Raja Saudi ini juga

menyadari kapabilitas, potensi dan kondisi Iran yang dapat meningkatkan kekuatan serta dapat memainkan peranan kunci dalam perkembangan regional.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa para elit politik Iran dan Arab Saudi memiliki peranan penting dalam meningkatkan hubungan politik antar dua negara, yang akhirnya merambat kepada hubungan kerjasama ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan tentang hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Perbedaannya ialah penelitian ini membahas hubungan baik dua negara, sebaliknya penelitian penulis membahas hubungan buruk antara kedua negara.

Keempat, Al Jazeera Center for Studies berjudul *"Power Imbalance: Iran's Gains, Saudi's Challenges"*. Paper ini membahas tentang hubungan permusuhan Iran dan Arab Saudi yang permasalahannya bertambah rumit. Masalah yang dibahas diawal ialah krisis minyak di Timur Tengah yang berdampak pada nilai minyak secara global. Krisis ini terjadi sejak agustus 2014, yang ditandai dengan turunnya nilai minyak hingga hampir mencapai setengah dari nilai pasar global. Iran dan Rusia menyalahkan Arab Saudi dan menuntut untuk bertanggungjawab dalam hal ini.

Menurut kedua negara, krisis ini terjadi karena Saudi yang merupakan stabilisator utama di mana ia merupakan satu-satunya negara yang bisa dengan mudah memproduksi minyak enam sampai dua belas juta barrel perhari, tidak mau mengurangi produksi minyaknya. Selain itu, seharusnya Saudi dapat memberikan pemahaman pada negara-negara anggota *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan non OPEC lainnya untuk membatasi produksi

minyak agar peluapan pasokan minyak tidak terjadi dan menyebabkan krisis seperti yang terjadi saat ini.<sup>23</sup>

Pada Januari 2015, presiden Iran Rouhani mengeluarkan pernyataan bahwa dua negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) yakni Arab Saudi dan Kuwait melancarkan perang minyak untuk menjatuhkan perekonomian Iran. Pernyataan ini kemudian memicu spekulasi tentang pecahnya perang minyak antara Iran beserta sekutu-sekutunya dan Arab Saudi dengan sekutu-sekutunya. Perkembangan perseteruan Iran dan Saudi tidak berhenti disitu, negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengenai program nuklir, kenyataannya membuat Arab Saudi khawatir. Jika kesepakatan antar dua negara tersebut tercapai, itu berarti bahwa Washington akan membiarkan pengaruh Iran yang lebih besar di kawasan meningkat. Hal ini tentunya membuat Arab Saudi panas karena potensi *dominant power* akan lebih berpihak pada Iran di Timur Tengah. Usaha untuk perimbangan kekuatan dalam persaingan kedua negara kemudian terus bergulir di kawasan.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa terjadi ketidakseimbangan *power* antara Iran dan Saudi, dimana Iran terlihat lebih potensial untuk menjadi *dominant power*. Arab Saudi khawatir terhadap pencapaian-pencapaian Iran khususnya mengenai kesepakatan nuklirnya dengan Amerika Serikat yang mendorong Saudi untuk lebih bekerjasama dengan negara-negara Arab lainnya dalam upaya menghambat atau menghentikan langkah Iran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada topik, di mana topik yang diangkat ialah tentang persaingan dan permusuhan antara Arab Saudi

---

<sup>23</sup> Al Jazeera Center for Studies, *Op. Cit.*

dan Iran. Perbedaannya ialah paper ini lebih meneliti kemajuan Iran yang terus meningkat sejak revolusi Islam Iran hingga dapat bersaing dengan Arab Saudi dan bahkan berpotensi mengungguli Arab Saudi. Sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang Strategi Arab Saudi untuk menandingi kekuatan Iran.

Kelima, Adel Altorai fi berjudul “*Understanding The Role Of State Identity in Foreign Policy Decision-Making, The Rise And Demise Of Saudi–Iranian Rapprochement (1997–2009)*”. Penelitian ini membahas tentang peran identitas Negara dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, dimana studi kasus yang diambil ialah fluktuasi pemulihan hubungan Saudi-Iran. Identitas Negara menjadi instrumen utama pembuat kebijakan untuk memahami tujuan kebijakan luar negeri mereka. Terdapat dua sumber bentuk identitas Negara, yaitu kognitif dan institusional. Perspektif kognitif menekankan pada pentingnya mengamati individu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Sedangkan perspektif institusional ialah bentuk identitas yang ditemukan secara domestik, yang berurusan dengan pembuatan keputusan kebijakan luar negeri.<sup>24</sup> Setiap negara memiliki struktur lembaga, yang berarti bahwa setiap negara memiliki peran kelembagaan yang berbeda dalam membentuk identitas negara.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor ideasional dan materialis berperan dalam kematian proses pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran, tetapi perubahan terhadap identitas Negara Iran selama jangka waktu pertama Presiden Ahmadinejad mengubah persepsi masing-masing negara

---

<sup>24</sup> Adel Altorai fi, 2012, *Understanding The Role Of State Identity in Foreign Policy Decision-Making, The Rise And Demise Of Saudi–Iranian Rapprochement (1997–2009)*, Tesis, London: Jurusan Hubungan Internasional, The London School of Economics and Political Science, hal. 274.

terhadap yang lain. Dengan demikian, hubungan berubah dari hubungan yang relatif ramah menjadi hubungan permusuhan dan persaingan. Hal ini dijelaskan dengan mengkaji diskursus Muqawama-mumana'a dan perdebatan “moderat” versus “radikal” yang mengambil narasi hubungan Arab Saudi-Iran antara tahun 2005 dan 2009.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada pembahasan tentang hubungan serta kebijakan luar negeri dua Negara. Perbedaannya ialah penelitian ini mengarah pada peran identitas Negara Iran dan Saudi dalam mempengaruhi hubungan dan kebijakan luar negeri masing-masing Negara. Sedangkan penelitian penulis mengarah pada politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran setelah hubungan dua negara semakin renggang pasca pelaksanaan eksekusi Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi.

**Tabel 1.1. Posisi Penelitian**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Metode Penelitian dan Landasan Teori	Hasil Penelitian
1.	Skripsi : <i>Rivalitas Antara Iran dan Arab Saudi dalam Perspektif Konstruktivis Alexandre Wendt</i>  Oleh: Cecep Zakaria El-Bilad	Metode Penelitian : Metode Eksplanatif, Model Pendekatan Reduksionis  Landasan teori : <i>Systemic Constructivism by Alexandre Wendt</i>	Dua kekuatan masing-masing berambisi untuk menjadi kekuatan dominan/pemimpin regional ( <i>regional leadership</i> ) di Timur Tengah. Selama keduanya sama-sama berpegang teguh pada ambisi masing-masing, rivalitas antara dua negara tersebut akan terus berlanjut.



2.	<p>Skripsi: <i>Pengaruh Nuklir Iran Terhadap Peningkatan Postur Militer Arab Saudi 2005-2009</i></p> <p>Oleh: Ilham Virgo</p>	<p>Metode Penelitian: Metode Eksplanatif, Model Pendekatan Korelasional</p> <p>Landasan teori : Konsep <i>deterrence</i>, <i>security dilemma</i> dan Teori <i>Balance of Power</i></p>	<p>-Pengaruh nuklir Iran menimbulkan <i>security dilemma</i> bagi Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, nuklir Iran mengancam keamanan dan kepentingan nasionalnya di Timur Tengah.</p>
3.	<p>Jurnal: <i>Role of Political Elites in Iran-Saudi Economic Cooperation</i></p> <p>Oleh: Reza Ekhtiari Amiri dan Ku Hasnita Ku Samsu</p>	<p>Metode penelitian: Metode Deskriptif</p> <p>Landasan teori : Model Aktor Rasional</p>	<p>Para elit politik Iran dan Arab Saudi memiliki peranan penting dalam meningkatkan hubungan politik antar dua negara, yang akhirnya merambat kepada hubungan kerjasama ekonomi. Elit Politik dari Iran yang dimaksud ialah Hasyemi Rafsanjani dan Mohammad Khatami, sedangkan elit dari Arab Saudi ialah Raja Abdullah bin Abdul Aziz.</p>
4.	<p>Paper: <i>Power Imbalance: Iran's Gains, Saudi's Challenges</i></p> <p>Oleh : Al Jazeera Center for Studies</p>	<p>Metode Penelitian: Metode Deskriptif</p> <p>Landasan teori: <i>National interest</i> dan <i>Balance of Power</i></p>	<p>- Adanya ketidakseimbangan <i>power</i> antara Iran dan Saudi, dimana Iran terlihat lebih potensial untuk menjadi <i>dominant power</i>.</p> <p>- Ketakutan Arab Saudi terhadap pencapaian-pencapaian Iran khususnya mengenai kesepakatan nuklirnya dengan AS, yang mendorong Saudi untuk bekerjasama dengan negara-</p>

			negara Arab lainnya dalam menghambat atau menghentikan langkah Iran.
5.	<p>Tesis:  <i>Understanding The Role Of State Identity in Foreign Policy Decision-Making, The Rise And Demise Of Saudi-Iranian Rapprochement (1997–2009)</i></p> <p>Oleh:  Adel Altorai</p>	<p>Metode Penelitian :  Metode Deskriptif</p> <p>Landasan Teori:  <i>State Identity Concept</i></p>	<p>Faktor ideasional dan materialis berperan dalam kematian proses pemulihan hubungan Arab Saudi dan Iran, tetapi perubahan terhadap identitas Negara Iran selama jangka waktu pertama Presiden Ahmadinejad mengubah persepsi masing-masing negara terhadap yang lain. Dengan demikian, hubungan berubah dari hubungan yang relatif ramah menjadi hubungan permusuhan dan persaingan. Hal ini dijelaskan dengan mengkaji diskursus Muqawama-mumana'a dan perdebatan “moderat” versus “radikal” yang mengambil narasi hubungan Arab Saudi-Iran antara tahun 2005 dan 2009.</p>
6.	<p>Skripsi: <i>Politik Luar Negeri Arab Saudi Terhadap Iran Pasca Eksekusi Nimr al-Nimr</i></p> <p>Oleh : Siti Aminah</p>	<p>Metode Penelitian:  Metode Deskriptif Analitis</p> <p>Landasan Teori:  Model <i>Foreign Policy</i> strategi konfrontasi John P. Lovel</p>	<p>Politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr berupa pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran dan penguatan intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Dua kebijakan politik luar negeri tersebut merupakan strategi konfrontasi Arab Saudi terhadap Iran. Adapun alasannya ialah Arab Saudi melihat Iran sebagai ancaman. Selain itu, Arab Saudi menganggap kapabilitas nasional</p>

			<p>negaranya lebih unggul dari pada Iran. Hal ini kemudian mendorong Arab Saudi untuk mempertajam isu yang menunjukkan konflik antara negaranya dengan Iran, yaitu dengan dua respon diatas. Tujuannya ialah untuk membuat Iran sadar bahwa kapabilitas nasional yang dimiliki lebih rendah dibandingkan negaranya. Dengan demikian nantinya Iran dapat menyesuaikan kebijakan yang akan dikeluarkan dengan kepentingan Arab Saudi. (HIPOTESA).</p>
--	--	--	---

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Model *Foreign Policy Strategy*

Politik luar negeri secara umum merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>25</sup> Untuk mencapainya, diperlukan suatu strategi yang sesuai untuk bisa diterapkan dalam upaya pencapaiannya. Dalam hal ini, John P. Lovell merumuskan model strategi kebijakan luar negeri suatu negara dengan menggunakan konsep “*game*” dan “*strategy*”.<sup>26</sup> *Game* dalam hal ini ialah permainan politik internasional antar dua negara atau lebih. Dalam memainkannya diperlukan strategi untuk menghadapi lawan. Berikut merupakan variabel kunci dari bermacam-macam strategi yang

<sup>25</sup> Yanyan Mochamad Yani, *Politik Luar Negeri*, diakses dalam [http://repository.unpad.ac.id/4390/1/politik\\_luar\\_negeri.pdf](http://repository.unpad.ac.id/4390/1/politik_luar_negeri.pdf) (10/11/17, 2:09 WIB)

<sup>26</sup> John P. Lovell, 1970, *Foreign Policy in Perspective; Strategy, Adaptation, Decision Making*, New York: Holt, Rinehalt and Winston, Inc, hal. 69.

dapat digunakan. Pertama, *parties and allignment*, berkoalisi dengan aktor lain dapat meningkatkan *payoffs* suatu negara, yang dalam konsep *game* berarti peningkatan level keamanan. Kedua, *stakes of the game* (taruhan permainan), suatu taruhan yang diajukan akan mengantarkan pembuat kebijakan dalam memilih satu strategi dari berbagai strategi yang ada.

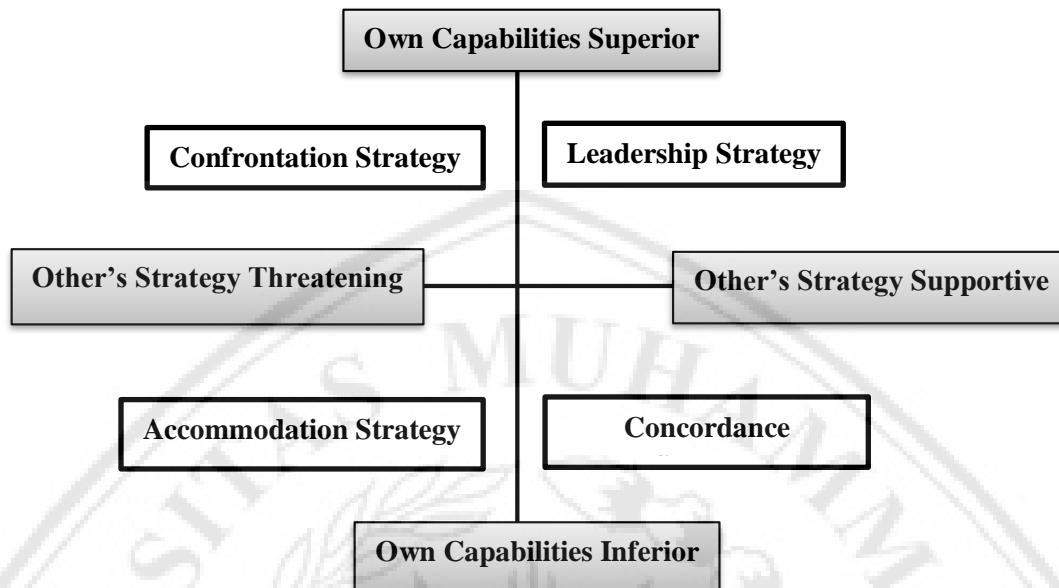
Kemudian, pertimbangan terhadap kapabilitas diri sendiri. Kemampuan apa yang dapat diunggulkan dan diandalkan serta kapabilitas mana yang paling lemah atau rentan. Selain itu, pertimbangan terhadap strategi yang lawan gunakan juga perlu untuk menyesuaikan dengan strategi yang sesuai untuk diterapkan. Terakhir ialah peraturan permainan, meskipun kebanyakan dari peraturan politik internasional tidak tertulis dan tidak formal, tetapi penting untuk mengetahuinya karena beberapa aspek strategi tidak dapat dijelaskan dengan jelas kecuali dengan mengetahui peraturan tersebut.

Interaksi antar negara dapat ditentukan baik itu saling mendukung atau sebagai ancaman dengan menggunakan dua variabel. Pembuat kebijakan mengestimasi strategi yang digunakan negara lain dan memperkirakan kapabilitas nasionalnya sendiri.<sup>27</sup> Dua variabel tersebut akan mengantarkan pembuat kebijakan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Strategi-strategi yang memungkinkan berdasarkan posisi suatu negara digambarkan dalam pola sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 99.

**Bagan 1.1 Model Strategi Kebijakan Luar Negeri**



*Policy makers' estimates of the strategy of another Nation-State and estimates of their own relative capabilities as a determinants of the style of interaction.<sup>28</sup>*

Pola gambar di atas dibagi menjadi dua hipotesis. Hipotesis pertama, ketika para pembuat kebijakan melihat strategi negara bangsa lain mendukung kepentingan negara sendiri. Dalam keadaan ini dua strategi berbeda diterapkan oleh dua negara bersangkutan. *Leadership strategy*, strategi ini digunakan oleh negara yang kapabilitas nasionalnya lebih unggul (negara A) dari pada negara lain (negara B). *Leadership* yang dimaksud ialah negara A akan menggunakan persuasi dan *bargaining* terhadap negara B, tidak dengan paksaan meskipun tindakan koersif bisa saja dilakukan. Strategi lainnya ialah *Concordance strategy*, strategi ini digunakan ketika kapabilitas suatu negara (negara B) lebih rendah dari negara lain (negara A). Pembuat kebijakan negara B akan berusaha

<sup>28</sup> *Ibid.*

mempertahankan hubungan harmonisnya dengan negara A dan menghindari pembuatan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan negara A.

Hipotesis kedua ialah ketika para pembuat kebijakan melihat strategi negara lain mengancam kepentingan nasional negaranya. Dua strategi berbeda juga digunakan oleh dua negara bersangkutan dalam keadaan ini. *Confrontation strategy*, strategi ini digunakan oleh negara C yang percaya bahwa ia memiliki kapabilitas nasional yang lebih unggul dibandingkan negara D. Negara C akan menajamkan isu-isu konflik kepentingan dengan negara D sehingga dapat memaksa negara D untuk mengakui posisi negara D yang *inferior* dari pada negara C. Selanjutnya *Accommodation strategy*, keadaan di mana kapabilitas nasional suatu negara lebih rendah dari pada negara lain yang mendorong negara tersebut untuk menggunakan strategi ini. Setelah menyadari kapabilitas negara C yang lebih unggul, negara D akan mencoba untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghindari konflik dengan negara C yang *superior*.

Strategi-strategi di atas tidak dapat digunakan secara mutlak dalam hubungan antara dua negara. Namun strategi-strategi tersebut dapat digunakan berdasarkan situasi dan kondisi permasalahan. Dalam satu kasus, negara C menggunakan strategi konfrontasi terhadap negara D. Namun dalam situasi atau kondisi lain yang berbeda, bisa jadi negara C menggunakan strategi akomodasi atau strategi lainnya.

Berdasarkan empat strategi kebijakan luar negeri yang dipaparkan di atas, strategi yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penelitian penulis ialah strategi konfrontasi. Politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-

Nimr berupa pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran dan penguatan intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Kedua kebijakan politik luar negeri tersebut merupakan strategi konfrontasi Arab Saudi terhadap Iran. Arab Saudi melihat Iran sebagai ancaman, dilihat dari persaingan-persaingan antar keduanya yang telah lama berlangsung, baik dari persaingan ideologi, pengaruh, kekuatan, minyak dan lain-lain.

Selain itu, Arab Saudi menyadari keunggulan kapabilitas nasionalnya dari pada Iran, sehingga negara ini dapat menajamkan isu-isu konflik berupa pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran dan penguatan intervensi militer di Yaman. Kapabilitas nasional Arab Saudi yang diunggulkan dalam persaingan ini ialah bidang ekonomi, posisi Arab Saudi sebagai kiblat Sunni, posisi Arab Saudi sebagai negara produsen minyak terbesar di timur tengah dan OPEC serta posisi Arab Saudi sebagai negara yang aktif dalam organisasi internasional, GCC. Kebijakan dan strategi Arab Saudi ini merupakan kalkulasi untung rugi yang telah Arab Saudi pertimbangkan untuk melemahkan posisi Iran dan menguatkan posisinya berupa pengaruh dan kekuatan di Timur Tengah.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif analitis karena bertujuan untuk menggambarkan politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr. Selain menjelaskan politik luar negeri, penelitian

ini juga menganalisis bahwa politik luar negeri Arab Saudi tersebut merupakan strategi konfrontasi Arab Saudi terhadap Iran.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan atau *Library Research*. Data yang diperoleh oleh peneliti adalah data-data sekunder dari buku-buku perpustakaan, jurnal, artikel, berita, skripsi, media elektronik, *working paper* dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki korelasi dengan konten penelitian.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Untuk memaparkan dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai bagaimana politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr, maka peneliti menggunakan teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian/peristiwa, dan lain-lain) yang dinyatakan dalam bentuk perkataan. Untuk itu diperlukan ukuran berupa mutu standar atau yang ideal sebagai pembanding terhadap fenomena tersebut.<sup>29</sup> Penelitian mengenai politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran ini dijelaskan tidak dengan menggunakan data-data perhitungan namun dari data yang diolah seperti ucapan, tulisan, perilaku yang diamati individu, masyarakat, kelompok atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

---

<sup>29</sup> Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, 2005, *Menulis Skripsi: Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*, Edisi: 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 44.



## **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.4.1 Batasan Waktu**

Menghindari pembahasan yang melebar, perlu untuk memberikan batasan ruang lingkup penelitian. Batasan waktu dari penelitian yang diangkat ialah sejak pelaksanaan eksekusi Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016 sampai Oktober 2016. Batasan waktu tersebut ditetapkan dengan alasan bahwa tensi konflik akibat dari eksekusi Nimr al-Nimr masih berlanjut dan hingga Oktober 2016 Arab Saudi masih mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang bersifat konfrontatif terhadap Iran.

### **1.6.4.2 Batasan Materi**

Batasan materi penelitian ini terfokus pada politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr. Politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr terdiri dari dua yaitu pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran dan Penguatan intervensi militer Arab Saudi di Yaman.

## **1.7 Argumentasi Dasar**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik argumentasi dasar bahwa politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr berupa pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran dan penguatan intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Dua kebijakan politik luar negeri tersebut merupakan strategi konfrontasi Arab Saudi terhadap Iran. Adapun alasannya ialah Arab Saudi melihat Iran sebagai ancaman. Selain itu, Arab Saudi menganggap

kapabilitas nasional negaranya lebih unggul dari pada Iran. Hal ini kemudian mendorong Arab Saudi untuk mempertajam isu yang menunjukkan konflik antara negaranya dengan Iran, yaitu dengan dua respon diatas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan politik luar negeri Arab Saudi terhadap Iran pasca eksekusi Nimr al-Nimr, maka penulis membagi pembahasan berdasarkan sistematika penulisan ke dalam lima bab. Bab I dalam penelitian ini ialah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah penelitian serta rumusan masalahnya. Tujuan dan manfaat penelitian dipaparkan setelahnya, di mana manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

Selain itu, terdapat penelitian-penelitian terdahulu untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Kerangka konseptual dijelaskan setelahnya, di mana kerangka konseptual yang digunakan ialah Model *Foreign Policy Strategy*. Adapun metode penelitian, penjelasannya terbagi menjadi empat bagian, yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan dan analisa data serta ruang lingkup penelitian. Terakhir, bab I ini menguraikan argumentasi dasar dari penelitian serta sistematika penulisannya.

Selanjutnya, Bab II berisi tentang eksekusi Nimr al-Nimr hingga penyerangan kantor kedutaan besar Arab Saudi. Adapun sub bab pertama membahas tentang eksekusi Nimr al-Nimr. Sedangkan sub bab kedua membahas tentang respon Iran terhadap eksekusi Nimr al-Nimr. Pembahasan sub bab kedua

ini dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, membahas tentang kecaman Iran terhadap eksekusi Nimr al-Nimr. *Kedua*, membahas tentang penyerangan kantor kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. *Terakhir*, membahas tentang Sikap pemerintah terhadap penyerangan kantor Kedubes Arab Saudi.

Adapun Bab III berisi pembahasan tentang pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Iran. Sub bab pertama menguraikan tentang kebijakan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sub bab kedua menjelaskan rasionalitas kebijakan Arab Saudi, di mana penjelasan sub bab kedua ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, Iran sebagai ancaman, ancaman yang dimaksud berupa nuklir Iran, persaingan minyak, *proxy war* Arab Saudi dan Iran di Suriah, Irak dan Yaman. *Kedua*, keunggulan kapabilitas nasional Arab Saudi dibandingkan Iran. Sub bab ketiga membahas mengenai dampak pemutusan hubungan diplomatik terhadap Arab Saudi, Iran dan Timur Tengah.

Selanjutnya, Bab IV membahas tentang penguatan intervensi militer Arab Saudi di Yaman. Adapun sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang konflik Yaman. Sub bab tersebut juga membahas *proxy war* Iran dan Arab Saudi yang berupa dukungan Iran terhadap pemberontak Houthi serta dukungan Arab Saudi terhadap pemerintahan Yaman. Sub bab kedua menguraikan tentang pertempuran antara koalisi pimpinan Arab Saudi dan Houthi pada tahun 2015. Sedangkan sub bab terakhir menjelaskan tentang perbandingan intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman pada tahun 2015 dan 2016.

Adapun Bab V ialah bab terakhir dalam penelitian ini. Bab V merupakan penutup yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan penelitian

yang telah dipaparkan. Selanjutnya, dalam bab ini dipaparkan saran untuk penelitian ini dan penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

